

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN EVALUASI

1. Langkah-Langkah Evaluasi Konsistensi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1	Tujuan pelaksanaan evaluasi:	
	Menilai konsistensi rancangan Perda dengan Perda tentang APBD, meliputi: a. kesesuaian pagu anggaran dalam APBD dengan pagu anggaran dalam rancangan Perda; b. kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan Perda; dan c. kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan Perda.	
2	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi:	
	a. dapatkan Perda APBD dan peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.	
	b. teliti pagu anggaran akun pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Perda APBD apakah telah sesuai dengan rancangan Perda dan peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD telah sesuai dengan	

	rancangan Perkada.	
	c. teliti kesesuaian anggaran yang tercantum pada ringkasan LRA dengan pagu pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perda tentang APBD.	
	d. teliti kesesuaian nomenklatur jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, program dan kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja, serta jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan antara APBD dengan rincian LRA.	
	e. teliti kesesuaian struktur dan klasifikasi jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, program dan kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja, serta jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan antara APBD dengan rincian LRA.	
	f. teliti kesesuaian total pendapatan, belanja masing-masing SKPD, dan pembiayaan pada SKPKD dan bandingkan dengan total pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Perda.	
	g. teliti kesesuaian penjumlahan rincian pendapatan masing-masing SKPD dan SKPKD dengan total pendapatan dalam rancangan Perda dan rancangan Perkada.	
	h. teliti kesesuaian penjumlahan rincian belanja masing-masing SKPD dan SKPKD dengan total belanja dalam rancangan Perda dan rancangan Perkada.	
	i. teliti kesesuaian penjumlahan rincian pembiayaan pada rancangan perda dengan total pembiayaan dalam rancangan Perda dan rancangan Perkada.	
	j. buat kesimpulan.	

2. Langkah-Langkah Evaluasi Kebijakan

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1	Tujuan pelaksanaan evaluasi:	
	<p>Menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD berkaitan dengan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kesesuaian realisasi anggaran dengan pagu anggaran dalam rancangan Perda; b. SiLPA; c. aset; d. kewajiban; e. pendapatan-LO; dan f. beban. 	
2	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait kesesuaian realisasi anggaran dengan pagu anggaran dalam rancangan Perda dan rancangan Perkada	
	<p>a. dapatkan dokumen yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan. 	
	<p>b. teliti kesesuaian besaran persentase serta jumlah total pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Perda dan rancangan Perkada pada LRA.</p>	
	<p>c. teliti kesesuaian besaran persentase realisasi anggaran pendapatan serta jumlah antara total realisasi pendapatan pada rancangan Perda dan rancangan Perkada.</p>	
	<p>d. teliti dan bandingkan antara realisasi dengan anggaran masing-masing akun, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan pada masing-masing SKPD dan SKPKD pada rancangan Perkada.</p>	
	<p>e. identifikasi masing-masing akun, jenis, obyek,</p>	

	<p>dan rincian obyek pendapatan pada masing-masing SKPD dan SKPKD pada rancangan peraturan Perkada, untuk menilai capaian realisasi dibandingkan anggaran, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) jauh melebihi yang dianggarkan;2) jauh dibawah yang dianggarkan;3) tidak terealisasi; atau4) terealisasi tetapi tidak dianggarkan.	
	<p>f. teliti perhitungan besaran persentase realisasi anggaran belanja serta jumlah total realisasi belanjanya pada rancangan Perda dan rancangan Perkada.</p>	
	<p>g. teliti dan bandingkan antara realisasi dengan anggaran masing-masing program dan kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja pada masing-masing SKPD dan SKPKD pada rancangan perkada.</p>	
	<p>h. identifikasi masing-masing akun, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja pada masing-masing SKPD dan SKPKD pada rancangan perkada, untuk menilai capaian realisasi dibandingkan anggaran, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) jauh dibawah yang dianggarkan; atau2) tidak terealisasi.	
	<p>i. teliti dan hitung persentase serta jumlah pembiayaan pada rancangan Perda dan rancangan Perkada pada anggaran dibandingkan dengan realisasinya.</p>	
	<p>j. teliti dan bandingkan realisasi dengan anggaran masing-masing jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan pada rancangan Perkada.</p>	
	<p>k. identifikasi masing-masing akun, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan pada rancangan Perkada, untuk menilai capaian realisasi dibandingkan anggaran.</p>	
	<p>l. pastikan apakah pengeluaran pembiayaan</p>	

	yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dengan peraturan daerah, dalam pelaksanaannya telah mematuhi ketentuan dimaksud.	
	m. buat kesimpulan.	
3.	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait SiLPA	
	a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan.	
	b. teliti dan identifikasi sumber-sumber penyebab SiLPA.	
	c. buat trend dan cermati SiLPA beberapa tahun terakhir (empat tahun terakhir).	
	d. teliti dan bandingkan besaran SiLPA terhadap besaran kewajiban jangka pendek.	
	e. teliti dan hitung rasio SiLPA terhadap anggaran belanja dalam APBD.	
	f. buat trend rasio SiLPA terhadap anggaran belanja dalam APBD beberapa tahun terakhir (empat tahun terakhir).	
	g. buat kesimpulan.	
4.	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait aset	
	a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan.	
	b. Kas dan setara kas	
	1) meneliti saldo kas dan setara kas pada catatan atas laporan keuangan.	
	2) meneliti dan cermati akun-akun pada kas	

	dan setara kas.	
	3) mencermati dan memastikan tidak terdapat saldo kas pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada tanggal pelaporan.	
	4) meneliti dan mencermati apakah selain penempatan uang pada RKUD pemerintah daerah juga melakukan penempatan kas pada bank lainnya.	
	5) apabila ditemukan adanya penempatan dalam bentuk deposito, pastikan bahwa jatuh tempo deposito tidak melebihi tanggal tahun pelaporan.	
	6) buat kesimpulan.	
	c. Piutang	
	1) meneliti saldo piutang daerah pada catatan atas laporan keuangan.	
	2) meneliti dan cermati akun-akun berdasarkan kelompok dan kualitas piutang.	
	3) meneliti dan mencermati serta membandingkan saldo piutang pada tanggal pelaporan berdasarkan jenis dan kualitas piutang terhadap saldo piutang tahun sebelumnya, untuk memastikan apakah saldo piutang mengalami peningkatan atau tidak, baik dari segi jumlah dan komposisi kualitas piutang.	
	4) menghitung rasio piutang berdasarkan kualitas piutang terhadap total piutang.	
	5) buat kesimpulan.	
	d. Persediaan	
	1) meneliti saldo persediaan pada catatan atas laporan keuangan.	
	2) membandingkan dan membuat rasio nilai per jenis persediaan terhadap total persediaan.	

	3) mencermati dan melakukan analisa terhadap persediaan yang pada tanggal pelaporan mempunyai nilai proporsi yang signifikan terhadap total persediaan.	
	4) mencermati dan membandingkan antara saldo persediaan tahun pelaporan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya, untuk memastikan apakah persediaan tersebut merupakan saldo persediaan tahun sebelumnya atau persediaan akibat pelaksanaan anggaran tahun pelaporan.	
	5) buat kesimpulan.	
	e. Investasi	
	1) meneliti saldo investasi pada catatan atas laporan keuangan.	
	2) meneliti dan mencermati metode pengakuan terhadap investasi pemerintah daerah.	
	3) meneliti dan memastikan masing-masing nilai investasi pada tanggal pelaporan.	
	4) meneliti dan membandingkan saldo investasi tanggal pelaporan terhadap saldo investasi tahun sebelumnya, serta mempelajari penjelasan investasi pada catatan atas laporan keuangan.	
	5) mencermati nilai pendapatan daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan membandingkan dengan masing-masing nilai investasi yang telah dikeluarkan.	
	6) buat kesimpulan.	
	f. Aset tetap	
	1) meneliti saldo aset tetap pada catatan atas laporan keuangan.	
	2) meneliti dan membandingkan saldo aset tetap tanggal pelaporan terhadap saldo aset tetap tahun sebelumnya, serta mempelajari penjelasan aset tetap pada catatan atas	

	laporan keuangan.	
	3) meneliti dan membandingkan penambahan aset tetap terhadap realisasi belanja modal untuk memastikan nilai penambahan aset tetap.	
	4) buat kesimpulan.	
5.	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait kewajiban	
	a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan.	
	b. meneliti saldo kewajiban pada catatan atas laporan keuangan.	
	c. meneliti dan membandingkan saldo kewajiban tanggal pelaporan terhadap saldo kewajiban tahun sebelumnya, serta mempelajari penjelasan kewajiban pada catatan atas laporan keuangan.	
	d. buat kesimpulan.	
6.	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait pendapatan LO	
	a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan.	
	b. meneliti rincian pendapatan LO pada catatan atas laporan keuangan.	
	c. meneliti dan membandingkan rincian pendapatan LO tanggal pelaporan terhadap rincian pendapatan LO tahun sebelumnya, serta pelajari penjelasan rincian pendapatan LO pada catatan atas laporan keuangan.	

	d. meneliti dan bandingkan rincian pendapatan-LO terhadap target pendapatan pada APBD.	
	e. buat kesimpulan.	
7.	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait beban	
	a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan.	
	b. meneliti rincian beban pada catatan atas laporan keuangan.	
	c. meneliti dan membandingkan rincian beban tanggal pelaporan terhadap rincian beban tahun sebelumnya, serta pelajari penjelasan rincian beban pada catatan atas laporan keuangan.	
	d. meneliti dan membandingkan jumlah beban dengan belanja antara lain: 1) beban pegawai dengan belanja pegawai; dan 2) beban barang dan jasa dengan belanja barang dan jasa.	
	e. buat kesimpulan.	

3. Langkah-Langkah Evaluasi Legalitas

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	2	3
1	Tujuan pelaksanaan evaluasi	
	Untuk menilai : a. kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda berkaitan dengan: 1) pembahasan rancangan Perda; 2) penyampaian rancangan Perda; dan 3) kelengkapan dokumen. b. kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan Perda dan rancangan Perkada	

	<p>berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) substansi batang tubuh rancangan Perda dan rancangan Perkada;2) substansi lampiran rancangan Perda dan rancangan Perkada; dan3) format penyajian rancangan Perda dan rancangan Perkada.	
2	<p>Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait dengan kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda</p>	
	<p>a. dapatkan dokumen pendukung paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">1) surat gubernur kepada DPRD provinsi atau surat bupati/wali kota kepada DPRD kabupaten/kota mengenai penyampaian rancangan Perda untuk dibahas bersama.2) persetujuan bersama antara gubernur dan DPRD provinsi atau persetujuan bersama antara bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota terhadap rancangan Perda.3) risalah sidang pembahasan rancangan Perda.4) surat gubernur atau surat bupati/wali kota mengenai penyampaian rancangan Perda atau rancangan Perkada kepada Menteri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota.5) rancangan Perda.6) lampiran rancangan Perda meliputi:<ol style="list-style-type: none">a) lampiran I LRA<ol style="list-style-type: none">(1) lampiran I.1 ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;(2) lampiran I.2 ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;(3) lampiran I.3 rekapitulasi realisasi	

	<p>anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan</p> <p>(4) lampiran I.4 rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara.</p> <ul style="list-style-type: none">b) lampiran II Laporan perubahan saldo anggaran lebih;c) lampiran III Laporan operasional;d) lampiran IV LPE;e) lampiran V Neraca;f) lampiran VI laporan arus kas;g) lampiran VII catatan atas laporan keuangan;h) lampiran VIII daftar rekapitulasi piutang daerah;i) lampiran IX daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;j) lampiran X daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;k) lampiran XI daftar penyertaan modal (investasi) daerah;l) lampiran XII daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;m) lampiran XIII daftar rekapitulasi aset tetap;n) lampiran XIV daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;o) lampiran XV daftar rekapitulasi aset lainnya;p) lampiran XVI daftar dana cadangan daerah;q) lampiran XVII daftar kewajiban jangka	
--	---	--

	<p>pendek;</p> <p>r) lampiran XVIII daftar kewajiban jangka panjang;</p> <p>s) lampiran XIX daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan</p> <p>t) lampiran XX ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.</p> <p>7) rancangan peraturan gubernur.</p> <p>8) lampiran rancangan peraturan gubernur meliputi:</p> <p>a) lampiran I ringkasan LRA; dan</p> <p>b) lampiran I.1 penjabaran LRA.</p> <p>9) dapatkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas:</p> <p>a) laporan keuangan;</p> <p>b) sistem pengendalian intern; dan</p> <p>c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p>b. teliti tanggal surat gubernur kepada DPRD provinsi atau surat bupati/walikota kepada DPRD kabupaten/kota mengenai penyampaian rancangan Perda untuk dibahas bersama, apakah paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun pelaporan berakhir.</p>	
	<p>c. teliti tanggal persetujuan bersama antara gubernur dan DPRD provinsi atau persetujuan bersama antara bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota terhadap rancangan Perda, apakah paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya rancangan Perda.</p>	
	<p>d. teliti risalah rapat paripurna DPRD provinsi/kabupaten/kota atas pembahasan rancangan Perda untuk mendapatkan informasi antara lain apakah rapat paripurna</p>	

	dimaksud memenuhi kuorum dan pastikan rapat paripurna tersebut membahas rancangan Perda.	
	e. teliti tanggal surat gubernur kepada menteri atau surat bupati/wali kota kepada gubernur mengenai penyampaian rancangan Perda dan rancangan Perkada apakah paling lama 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama antara Gubernur dengan DPRD provinsi atau persetujuan bersama antara Bupati/Wali kota dengan DPRD kabupaten/kota.	
	f. teliti dan cermati substansi rancangan perda untuk memastikan apakah dalam batang tubuh rancangan Perda telah mencakup LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.	
	g. teliti dan cermati lampiran rancangan perda untuk memastikan apakah telah lengkap sesuai yang dipersyaratkan.	
	h. teliti dan cermati substansi pada batang tubuh rancangan Peraturan Gubernur atau rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota untuk memastikan apakah telah mencakup pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan.	
	i. teliti dan cermati lampiran rancangan Peraturan Gubernur atau rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota untuk memastikan apakah telah mencakup ringkasan LRA dan penjabaran LRA.	
	j. cermati laporan hasil pemeriksaan BPK antara lain untuk mendapatkan informasi opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, temuan sistem pengendalian intern, dan temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	
	k. buat kesimpulan.	
3	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait kepatuhan atas penyajian informasi dalam	

	rancangan Perda dan rancangan Perkada	
	a. dapatkan rancangan Perda dan rancangan Perkada.	
	b. teliti dan cermati format penyajian: 1) rancangan Perda meliputi batang tubuh dan lampirannya (lampiran I s.d. lampiran XX); dan 2) rancangan Perkada meliputi batang tubuh dan lampirannya (lampiran I dan lampiran I.1).	
	c. teliti format penyajian rancangan Perda dan rancangan Perkada apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
	d. buat kesimpulan.	

4. Evaluasi kesesuaian dengan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1	Tujuan pelaksanaan evaluasi	
	Menilai apakah rancangan Perda telah sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan terkait: a. struktur; b. klasifikasi; dan c. pengukuran.	
2	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
	a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun berkenaan.	
	b. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait pendapatan LRA.	
	c. cermati pendapatan-LRA, apakah temuan BPK	

	sudah atau belum terakomodasi dalam akun pendapatan-LRA.	
	d. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK lakukan identifikasi temuan yang terkait belanja dan transfer.	
	e. cermati akun belanja dan transfer, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam akun belanja dan/atau akun transfer.	
	f. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait pembiayaan.	
	g. cermati pembiayaan, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam akun pembiayaan.	
	h. buat kesimpulan.	
3	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL)	
	a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun berkenaan.	
	b. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait LPSAL.	
	c. cermati LPSAL, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam LPSAL.	
	d. buat kesimpulan.	
4	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait neraca	
	a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun berkenaan.	

	b. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait aset.	
	c. cermati aset, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam neraca.	
	d. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait kewajiban.	
	e. cermati kewajiban, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam neraca.	
	f. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK lakukan identifikasi temuan yang terkait ekuitas.	
	g. cermati ekuitas, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam neraca.	
	h. buat kesimpulan.	
5	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait Laporan Operasional (LO)	
	a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun berkenaan.	
	b. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait pendapatan LO.	
	c. cermati pendapatan-LO, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam akun pendapatan-LO.	
	d. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait beban.	
	e. cermati beban, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam akun beban.	
	f. buat kesimpulan.	
6	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait	

	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	
	a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun berkenaan.	
	b. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait ekuitas pada LPE.	
	c. cermati LPE, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam LPE.	
	d. buat kesimpulan.	
7	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait Laporan Arus Kas (LAK)	
	a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun berkenaan.	
	b. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait LAK.	
	c. cermati LAK, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam LAK.	
	d. buat kesimpulan.	
8	Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terkait Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	
	a. dapatkan dokumen yang terdiri dari: 1) rancangan Perda beserta lampirannya dan rancangan Perkada beserta lampirannya tahun berkenaan; dan 2) laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun berkenaan.	
	b. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait	

	LRA pada CaLK.	
	c. cermati atas pengungkapan LRA pada CaLK, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam CaLK.	
	d. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK lakukan identifikasi temuan yang terkait LPSAL pada CaLK.	
	e. cermati atas pengungkapan LPSAL pada CaLK, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam CaLK.	
	f. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait pengungkapan neraca pada CaLK.	
	g. cermati atas pengungkapan neraca pada CaLK, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam CaLK.	
	h. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait LO pada CaLK.	
	i. cermati atas pengungkapan LO pada CaLK, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam CaLK.	
	j. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait LPE pada CaLK.	
	k. cermati atas pengungkapan LPE pada CaLK, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam CaLK.	
	l. teliti dan cermati laporan hasil pemeriksaan BPK, lakukan identifikasi temuan yang terkait LAK pada CaLK.	
	m. cermati atas pengungkapan LPE pada CaLK, apakah temuan BPK sudah atau belum terakomodasi dalam CaLK.	
	n. buat kesimpulan.	

B. FORMAT KERTAS KERJA

1. FORMAT KERTAS KERJA EVALUASI KONSISTENSI

KERTAS KERJA EVALUASI KONSISTENSI
RANCANGAN PERDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

EVALUATOR :
TAHUN :
DIBUAT OLEH :
DIPERIKSA OLEH :

No	Uraian	Dokumen	Sesuai/Tidak Sesuai	Keterangan
1	2	3	4	5

Kesimpulan:

Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi dengan no urut;
2. Kolom 2 diisi dengan aktifitas sesuai langkah-langkah pada lampiran bagian A angka 1;

3. Kolom 3 diisi dengan nama dokumen yang menjadi dasar penilaian;
4. Kolom 4 diisi dengan “sesuai” atau “tidak sesuai”, sesuai dengan hasil penilaian;
5. Kolom 5 diisi dengan informasi lain yang relevan.

2. FORMAT KERTAS KERJA EVALUASI KEBIJAKAN

KERTAS KERJA EVALUASI KEBIJAKAN
RANCANGAN PERDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

EVALUATOR :

TAHUN :

DIBUAT OLEH :

DIPERIKSA OLEH :

No	Uraian	Dokumen	Hasil Analisis	Keterangan
1	2	3	4	5

Kesimpulan:

Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi dengan no urut;
2. Kolom 2 diisi dengan aktifitas sesuai langkah-langkah pada lampiran bagian A angka 2;
3. Kolom 3 diisi dengan nama dokumen yang menjadi dasar penilaian;
4. Kolom 4 diisi dengan hasil analisis atas aktifitas yang dilakukan pada kolom 2;
5. Kolom 5 diisi dengan informasi lain yang relevan.

3. FORMAT KERTAS KERJA EVALUASI LEGALITAS

KERTAS KERJA EVALUASI LEGALITAS

RANCANGAN PERDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

EVALUATOR :
TAHUN :
DIBUAT OLEH :
DIPERIKSA OLEH :

No	Uraian	Dokumen	Ya/Tidak	Keterangan
1	2	3	4	5

Kesimpulan:

Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi dengan no urut;
 2. Kolom 2 diisi dengan aktifitas sesuai langkah-langkah pada lampiran bagian A angka 3;
 3. Kolom 3 diisi dengan nama dokumen yang menjadi dasar penilaian;
 4. Kolom 4 diisi dengan “ya” atau “tidak”, sesuai dengan hasil penilaian;
 5. Kolom 5 diisi dengan informasi lain yang relevan.
4. FORMAT KERTAS KERJA EVALUASI KESESUAIAN DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

KERTAS KERJA EVALUASI KESESUAIAN DENGAN TEMUAN LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN BPK RANCANGAN PERDA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

EVALUATOR :

TAHUN :

DIBUAT OLEH :

DIPERIKSA OLEH :

No	Uraian	Dokumen	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	2	3	4	5

Kesimpulan:

Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi dengan no urut;
2. Kolom 2 diisi dengan aktifitas sesuai langkah-langkah pada lampiran bagian A angka 4;
3. Kolom 3 diisi dengan nama dokumen yang menjadi dasar penilaian;
4. Kolom 4 diisi dengan hasil analisis atas aktifitas yang dilakukan pada kolom 2;
5. Kolom 5 diisi dengan informasi lain yang relevan.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,
ttd

W. SIGIT PUDJIANTO

NIP. 19590203 198903 1 001.